

PENGARUH MOTIVASI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SANKSI ADMINISTRASI DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Sri Lestari Yuli Prastyatini¹⁾, Yunita Adi Nabela²⁾

^{1,2} Fakultas Ekonomi/Akuntansi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

¹ E-mail: srilestari_yul@ustjogja.ac.id

² E-mail: yunitaadi26@gmail.com

Abstract

This research aims to determine the effect of motivation, utilization of information technology, administrative sanctions, and income levels on motor vehicle taxpayer compliance. Source of data used in this research is primary data. The population used is motorvehicle taxpayers in Kapanewon Wonosari, Gunungkidul Regency. The sample in this research were 115 motor vehicle taxpayers in sampling. Analysis of the data used using multiple linear analysis. The results showed that motivation and utilization of information technology had no effect on motor vehicle tax compliance with significant values of 0.387 and 0,052. Administrative sanctions and income levels have a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance with significant values of 0.000 and 0.000 respectively and t values of 3.632 and 5.303 respectively.

Keywords : *Motivation, Utilization of Information Technology, Administrative Sanctions, Income Levels, and Motor Vehicle Taxpayer Compliance*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan yang paling utama dalam penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasil pajak ini nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai segala bentuk pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang nantinya akan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan sarana prasarana dan peningkatan sarana publik (Siahaan, 2013).

Salah satu pajak yang berperan penting dalam menumbang pendapatan negara ialah pajak kendaraan bermotor. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan mengenai pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak yang memiliki kendaraan yang menggunakannya di jalan umum. Adanya perkembangan kendaraan bermotor untuk setiap tahunnya, tentunya akan dapat dimanfaatkan oleh pihak samsat untuk melakukan pungutan

pajak motor bagi wajib pajak yang telah memiliki tanggungan. Dengan demikian pendapatan daerah dari sektor pajak akan meningkat. Dilihat dari data yang diperoleh dari kantor samsat Kabupaten Gunungkidul khususnya wilayah Kapanewon Wonosari masih ada beberapa wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak melakukan kewajiban perpajakan, sehingga pemerintah daerah tidak dapat memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data penunggakan pajak yang diperoleh dari Kantor Samsat Gunungkidul Periode 2017-2021 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 1 Data Penunggakan WP PKB Kapanewon Wonosari Periode 2017-2021

Tahun	Jumlah WP PKB	WP yang Menunggak
2017	54.424	7.662
2018	56.694	6.806
2019	60.033	7.717
2020	62.268	12.541
2021	64.227	18.665

Sumber: Kantor Samsat Gunungkidul, data diolah 2022

Berdasarkan dari tabel 1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 terjadi penunggakan pajak kendaraan bermotor di Kapanewon Wonosari sejumlah 7.662, tahun 2018 terjadi penunggakan

pajak kendaraan bermotor berjumlah 6.806, tahun 2019 terjadi penunggakan pajak kendaraan bermotor berjumlah 7.717, sedangkan pada tahun 2020 terjadi penunggakan pajak kendaraan bermotor sejumlah 12.541, dan pada tahun 2021 terjadi penunggakan pajak kendaraan bermotor sejumlah 18.665. Berdasarkan pada hasil yang telah dipaparkan, maka perlu adanya faktor-faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, terutama pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kapanewon Wonosari.

Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan penting dengan penerimaan pajak negara. Hal ini dikarenakan jika kepatuhan wajib pajak di suatu negara meningkat maka secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan suatu negara dari sektor perpajakan. Menurut Ilhamsyah dkk., (2016) kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi seseorang wajib pajak akan memenuhi kewajiban berupa perpajakan dan melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diperlukan adanya motivasi. Motivasi merupakan keinginan yang timbul baik itu dari dalam diri seseorang ataupun dorongan orang lain yang akan mendorong seseorang tersebut untuk membayar kewajiban perpajakan Indriyani & Simbolon (2022). Sedangkan menurut beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan sesuatu yang datang dari dalam diri individu atau dorongan dari orang lain untuk melakukan sesuatu dengan maksud guna untuk mencapai tujuan tertentu. Penelitian terdahulu oleh Mawarni dkk., (2017) menghasilkan bahwa motivasi untuk membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor yang kedua yaitu adanya pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan proses mengolah maupun memproses data seperti: menyusun, mengambil, memanipulasi, dan menyimpannya untuk menciptakan inovasi hasil yang lebih akurat, relevan dan tepat waktu (Dewi dkk., 2022). Pemanfaatan teknologi digunakan oleh wajib pajak untuk mengakses Elektronik Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (E-Samsat). Menurut Sudrajat & Ompusunggu (2015) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi

informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun menurut Susanti (2018) menjelaskan bahwa penerapan sistem informasi e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi Administrasi menurut Puteri dkk., (2019) adalah sanksi yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi administrasi ini mempunyai peran penting terhadap kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya sanksi administrasi maka diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga akan meningkatkan pendapatan Negara. Menurut penelitian yang dilakukan Sabtohadhi dkk., (2021) menyebutkan bahwa sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan menurut Irianingsih (2015) bahwa sanksi administrasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal lain yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ialah tingkat pendapatan. Menurut Ningsih dkk., (2022) menjelaskan bahwa pendapatan ialah sebuah tambahan keuangan yang diterima oleh setiap wajib pajak baik itu pendapatan yang berasal dari Indonesia atau luar negeri yang mampu digunakan oleh wajib pajak untuk keperluan sehari-hari yang pendapatan tersebut akan menambah kekayaan wajib pajak. Tingkat pendapatan inilah yang relevan untuk melihat kemampuan seseorang wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian Sabtohadhi dkk., (2021) menghasilkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun berbeda dengan penelitian Sihombing (2022) bahwa tingkat pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Bersumber dari uraian diatas, dapat ditemui bahwa sebagian hasil penelitian terdahulu menampilkan bahwa hasil penelitian tersebut berbeda. Hal ini karena dipengaruhi oleh keadaan dan objek penelitian. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk meneliti kembali atas inkonsistensi variabel-variabel tersebut untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Landasan Teori

Teori Perilaku Berencana (*Theory of Planned Behavior*)

Penelitian Akbar & Apollo (2018), menjelaskan bahwa teori perilaku berencana atau *Theory of Planned Behavior* ini diperkenalkan pada tahun 1991 oleh Azjen. Teori ini biasanya digunakan untuk mengkaji apakah perilaku seseorang wajib pajak tersebut dipengaruhi oleh niat seseorang atau individu tersebut. Menurut Wahyuningsih (2019) perilaku individu dipengaruhi oleh intensi terhadap perilaku. Adapun faktor yang mempengaruhi individu untuk melakukan tindakan antara lain: sikap, norma subjektif, dan persepsi control perilaku.

Teori Atribusi

Teori atribusi ialah teori yang menjelaskan mengenai perilaku seseorang atau individu. Teori ini biasanya digunakan seseorang untuk menentukan mengenai bagaimana seseorang atau individu untuk menentukan penyebab perilaku yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Penyebab terjadinya perilaku seseorang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu perilaku seseorang yang disebabkan secara internal yaitu yang berupa perilaku yang berasal dari pribadi individu atau individu itu sendiri, sedangkan penyebab selanjutnya disebabkan faktor eksternal individu yaitu perilaku seseorang yang dipengaruhi dari luar individu tersebut atau seseorang yang terpaksa berperilaku karena situasi dan kondisi tersebut (Wardani & Rumiayatun, 2017).

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM)

Teori TAM merupakan teori dimana sebuah sistem informasi yang meliputi proses pengambilan keputusan terkait dengan apakah suatu teknik tersebut dapat diterima atau ditolak. TAM adalah sebuah aplikasi dari *Reasoned Action Theory* atau bisa disebut dengan TRA, dengan maksud dan tujuannya untuk membentuk penerimaan teknologi oleh para penggunanya (Dewi dkk., 2022).

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Penelitian Ningrum dkk., (2021) menjelaskan bahwa pengertian dari motivasi ialah proses psikologis yang akan terjadi pada seseorang jika adanya interaksi antar sikap seseorang, kebutuhan hidup, persepsi individu dan pemecahan personal. Dengan adanya

motivasi tersebut maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian Oktavia & Suryono (2021) menjelaskan bahwa postur motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Mawarni dkk., (2017) yang menunjukkan bahwa motivasi membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan dari uraian diatas maka hipotesis yang pertama adalah:

H1= Motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan di dalam sistem administrasi perpajakan ini akan menimbulkan banyak terjadinya perubahan dalam segi administrasi perpajakan misalnya dalam pelaksanaan administrasi pajak yang semula dilakukan manusia akan digantikan mesin elektronik. Semakin banyaknya pemanfaatan teknologi informasi perpajakan, maka akan semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut penelitian Oktavianingrum dkk., (2021) menghasilkan bahwa penerapan online e-samsat berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Sejalan penelitian yang dilakukan oleh Anshori (2020) menghasilkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara parsial dan simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pada uraian diatas disimpulkan bahwa hipotesis kedua yaitu:

H2= Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi administrasi adalah sanksi yang memiliki peranan penting didalam memberikan efek jera bagi setiap wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan

perpajakan. Sanksi ini dibuat oleh pemerintah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia Sabtohadhi dkk., (2021). Menurut penelitian Sabtohadhi dkk., (2021) dan Puteri dkk., (2019) yang menghasilkan bahwa sanksi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bermotor. Sehingga dapat disimpulkan untuk hipotesis yang ketiga yaitu sebagai berikut:

H3= Sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

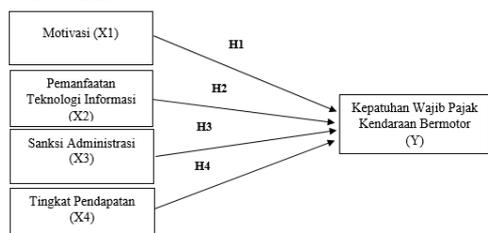
4. Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Penelitian Yanti (2018) mengidentifikasi bahwa tingkat pendapatan merupakan sebuah tingkatan keuangan wajib pajak, jika pendapatan rendah dapat dikatakan bahwa tingkat pendapatan tersebut sebagai salah satu tekanan bagi kehidupan wajib pajak dimana wajib pajak yang memiliki penghasilan rendah mereka akan mneghindari untuk membayar pajak hal ini dikarenakan kondisi ekonomi yang buruk karena pengeluaran yang dikeluarkan untuk kebutuhan keluarga lebih besar daripada pendapatannya. Menurut penelitian Sabtohadhi dkk., (2021) dan Ningsih dkk., (2022) menghasilkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yaitu sebagai berikut:

H4= Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016) pengertian dari penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang berfungsi untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah ditetapkan. Untuk menyusun penelitian ini peneliti menggunakan data primer yang berupa kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kapanewon Wonosari. Sedangkan sampel yang digunakan yaitu sejumlah 115 wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kapanewon Wonosari. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak melalui aplikasi *Whats App* (WA). Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala *likert 1-5 point*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Uji Kualitas Data

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

No.	Variabel Indikator	Pearson Correlation	r-tabel	Sig.	Keterangan
1.	Motivasi				
	Butir MO1	0,733	0,183	0,000	Valid
	Butir MO2	0,795	0,183	0,000	Valid
2.	Pemanfaatan Teknologi Informasi				
	Butir PT1	0,766	0,183	0,000	Valid
	Butir PT2	0,703	0,183	0,000	Valid
	Butir PT3	0,782	0,183	0,000	Valid
	Butir PT4	0,736	0,183	0,000	Valid
3.	Sanksi Administrasi				
	Butir SA1	0,709	0,183	0,000	Valid
	Butir SA2	0,709	0,183	0,000	Valid
	Butir SA3	0,730	0,183	0,000	Valid
4.	Tingkat Pendapatan				
	Butir TP1	0,831	0,183	0,000	Valid
	Butir TP2	0,794	0,183	0,000	Valid
	Butir TP3	0,802	0,183	0,000	Valid
5.	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor				
	Butir KW1	0,756	0,183	0,000	Valid
	Butir KW2	0,832	0,183	0,000	Valid
	Butir KW3	0,819	0,183	0,000	Valid
	Butir KW4	0,791	0,183	0,000	Valid
	Butir KW5	0,793	0,183	0,000	Valid
	Butir KW6	0,711	0,183	0,000	Valid

Sumber: Data Primer, 2022, diolah

Berdasarkan pada hasil uji validitas yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan yang telah diuji dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan nilai *pearson correlation* > *r-tabel*.

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel Indikator	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Motivasi	0,633	Reliabel
2.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,755	Reliabel
3.	Sanksi Administrasi	0,636	Reliabel
4.	Tingkat Pendapatan	0,805	Reliabel
5.	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	0,870	Reliabel

Sumber: Data Primer, 2022, diolah

Berdasarkan pada uji reliabilitas yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dinyatakan reliabel. Hal ini dikarenakan bahwa nilai dari setiap variabel yang diuji memiliki nilai *Cronbach's Alpha* diatas 0,600.

Uji Asumsi Klasik

Berikut ini adalah tabel dari uji asumsi klasik yaitu sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Asumsi Klasik

Asumsi Klasik	Pengujian	Kriteria	Nilai	Hasil Penelitian
Uji Normalitas	<i>One Sample Kolmogorov-Smirnov</i>	Sig. > 0,05	Sig. 0,062	Asumsi Terpenuhi
Uji Multikolinearitas	<i>Variance Inflation Factor</i>	VIF < 10	MO= 1,532 PT = 1,589 SA = 1,200 TP = 1,570	Asumsi Terpenuhi
Uji Heteroskedastisitas	<i>Uji Park</i>	Sig. > 0,05	MO= 0,525 PT = 0,327 SA = 0,055 TP = 0,076	Asumsi Terpenuhi

Sumber: Data Primer, 2022, diolah

Uji Normalitas

Berdasarkan pada tabel 4 dapat disimpulkan bahwa pada uji normalitas yang telah diuji tersebut berdistribusi normal. Hal ini dikarenakan nilai signifikansinya 0.062 > 0.05.

Uji Multikolineaitas

Berdasarkan tabel 4 hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai VIF dari masing-masing variabel tersebut berturut-turut adalah 1.532, 1.589, 1.200 dan 1570. Sehingga diketahui bahwa pada keempat variabel yang telah diuji tersebut memiliki nilai VIF < 10, sehingga semua variabel tersebut terhindar dari multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan pada tabel 4 disimpulkan bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel secara berturut-turut adalah sebagai berikut: 0.525, 0.327, 0.055, dan 0.076. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut terhindar dari heteroskedastisitas. Hal ini karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0.05.

Analisis Regresi Berganda

Berikut disajikan tabel analisis regresi berganda yaitu sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.336	2.577		1.682	.095
MO	-.162	.187	-.075	-.868	.387
1 PT	.216	.110	.172	1.962	.052
SA	.408	.112	.276	3.632	.000
TP	.732	.138	.461	5.303	.000

a. Dependent Variable: KW

Sumber: Data Primer, 2022, diolah

Berdasarkan pada tabel 5 diatas, maka diperoleh model persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$KW = 4,336 - 0,162 MO + 0,216 PT + 0,408 SA + 0,732 TP + e$$

Keterangan:

- KW = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
- 4,336 = Konstanta
- 0,162 = Motivasi
- 0,216 = Pemanfaatan Teknologi Informasi
- 0,408 = Sanksi Administrasi
- 0,732 = Tingkat Pendapatan

Uji Simultan (F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah pada variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Berikut disajikan hasil uji simultan (F) yang telah diuji yaitu sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Uji Simultan (F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	484.626	4	121.157	24.354	.000 ^a
1 Residual	547.234	110	4.975		
Total	1031.861	114			

a. Dependent Variable: Total_KW

b. Predictors: (Constant), TP, SA, MO, PT

Sumber: Data Primer, 2022, diolah

Berdasarkan pada tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara simultan atau secara bersama-sama. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi pada tabel tersebut yaitu sebesar 0.000 < 0.05.

Koefisien Determinasi (R²)

Uji R² pada dasarnya digunakan untuk mengukur model dalam menjelaskan variabel-variabel terikat. Adapun nilai yang digunakan adalah nilai *Adjusted R²*. Berikut ini merupakan hasil dari uji koefisien determinasi:

Tabel 7 Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.685 ^a	.470	.450	2.230

a. Predictors: (Constant), TP, SA, MO, PT

Sumber: Data Primer, 2022, diolah

Berdasarkan pada hasil uji koefisien determinasi pada tabel 7 diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,450 yang artinya bahwa

besarnya setiap pengaruh dari motivasi, pemanfaatan teknologi informasi, sanksi administrasi, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 45% sisanya sebesar 55% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Uji Parsial (Uji t)

Pengaruh variabel secara parsial dapat dilihat melalui uji t. Berikut ini disajikan hasil uji parsial (t) yaitu sebagai berikut:

Tabel 8 Hasil Uji Parsial (t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	4.336	2.577			1.682	.095
MO	-.162	.187	-.075	-.868	-.387	
1 PT	.216	.110	.172	1.962	.052	
SA	.408	.112	.276	3.632	.000	
TP	.732	.138	.461	5.303	.000	

a. Dependent Variable: KW

Sumber: Data Primer, 2022, diolah

3.2. Pembahasan

Bedasarkan pada hasil uji t dapat dijelaskan sebagai berikut.

Hipotesis 1: Motivasi Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan pada tabel 8 pada hipotesis 1 menyatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kapanewon Wonosari. Hal tersebut dibuktikan motivasi memiliki nilai signifikansi $0,387 > 0,05$ dan nilai t sebesar $-0,868$. Dengan demikian hipotesis yang menyebutkan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ditolak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktavia & Suryono, 2021).

Motivasi tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Fakta tersebut didukung dengan anggapan dari seseorang bahwa kewajiban untuk membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara. Setuju atau tidaknya membayar pajak hal ini sudah menjadi keharusan yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh setiap warga negara. Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak untuk membayar kendaraan bermotor tersebut sifatnya adalah paksaan, sanksi administrasi, dan bukan keinginan dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Sehingga

dapat dikatakan bahwa motivasi tidak mempengaruhi wajib pajak dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hipotesis 2: Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan pada tabel 8 hipotesis 2 menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut dibuktikan pada tingkat signifikansi yaitu sebesar $0,052 > 0,05$ dan nilai t sebesar $1,962$. Sehingga hipotesis kedua ini ditolak. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan (Susanti, 2018).

Pemanfaatan teknologi informasi e-samsat ini baru saja diterapkan dan masih kurangnya sosialisasi terkait sistem tersebut dan tata cara penggunaannya dari pihak terkait kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang mengakibatkan mereka belum mengetahui tentang layanan atau sistem tersebut. Dengan kondisi tersebut wajib pajak memilih untuk melakukan kewajiban pajak kendaraan bermotor melalui kantor samsat. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi tidak mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hipotesis 3: Sanksi Administrasi Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan pada tabel 8 hipotesis 3 menyatakan bahwa sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan variabel sanksi administrasi memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,000$ dibawah $0,05$ dengan nilai t $3,632$. Sehingga hipotesis keempat diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Sabtohadhi dkk., 2021).

Sanksi administrasi sangat dibutuhkan untuk keperluan pemberian efek jera bagi pelanggar pemenuhan kewajiban perpajakan atau kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adanya sanksi administrasi yang akan diberikan kepada para pelanggar kewajiban perpajakan apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan, maka sanksi tersebut akan membebani wajib pajak. Semakin tinggi sanksi administrasi yang

didapatkan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hipotesis 4: Tingkat Pendapatan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan pada tabel 8 hipotesis 4 menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan bahwa tingkat pendapatan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai t sebesar 5,303. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terdukung atau diterima. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Ningsih dkk., 2022).

Jika pendapatan yang diterima oleh seorang wajib pajak tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Namun jika pendapatan yang diterima rendah maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan menurun. Namun mengingat bahwa pentingnya membayar pajak dan merupakan pungutan wajib yang sifatnya memaksa dimana pendapatan wajib pajak rendah tidak serta merta menjadikan wajib pajak tidak patuh untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Dengan kondisi tersebut wajib pajak dengan terpaksa akan melakukan pembayaran pajak walaupun pendapatan yang diterima rendah.

4. KESIMPULAN

Simpulan

1. Motivasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Keterbatasan

1. Penelitian ini berfokus pada 4 variabel independen yaitu motivasi, pemanfaatan teknologi informasi, sanksi administrasi, dan tingkat pendapatan yang hanya berpengaruh sebesar 47% terhadap kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor. Oleh karena itu terdapat variabel independen lain yang tidak diteliti oleh peneliti yang dapat berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu sebanyak 55%.

2. Penelitian ini hanya berfokus di Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Hal ini dikarenakan Kapanewon Wonosari merupakan wilayah yang penduduknya memiliki kendaraan bermotor terbanyak dibandingkan kecamatan yang lain. Sehingga potensi penunggakan pajak kendaraan bermotor relatif tinggi.
3. Penelitian ini hanya menggunakan satu sumber yaitu kuesioner, akan tetapi kuesioner tersebut juga mempunyai kekurangan yang ada kalanya jawaban responden tidak menunjukkan keadaan responden yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan bahwa responden tersebut tidak objektif dalam menjawab pernyataan.

Saran

Berdasarkan pada keterbatasan penelitian, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya agar menambah variabel baru atau variabel yang berbeda misalnya, menambah dengan variabel ajaran Tamansiswa yaitu Tri-Nga (Ngerti, Ngrasa, Nglakoni) dan variabel tingkat pendidikan sebagai variabel intervening, menggunakan teori yang baru, dan metode yang lain.
2. Penelitian selanjutnya agar memperbesar wilayah penelitian sehingga sampel yang digunakan tidak hanya berada dalam satu wilayah kecamatan agar penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang maksimal.
3. Pada penelitian selanjutnya peneliti dapat menambahkan jumlah sampel dan memperluas ruang lingkup penelitian agar dapat mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

5. REFERENSI

- Akbar, H., & Apollo. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah). *Sistem Informasi*, 1(September), 60–69.
- Anshori, Z. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang

- Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Media Mahardhika*, 19(1), 130–142.
- Dewi, H. D. M., Antaris, B., Aditya, R. H., & Saputra, D. D. (2022). *Analisis Penerimaan Aplikasi Dana Menggunakan Technology Acceptance Model (Tam) (Studi Kasus : Universitas Upn " Veteran " Jawa Timur)*. September, 10–11.
- Farandy, M. R. (2018). Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–119.
- Gunungkidul, Samsat. (2022). *Data Pnunggakan Pajak WPPKB*.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)*.
- Indriyani, D., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak, Motivasi Membayar Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Batam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 69–90.
- Irianingsih, E. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). *Teaching and Teacher Education*, 12(1), 1–17.
- Julianto, H. (2020). *Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan Dan Pengawasan Pajak Terhadap Tax Evasion*.
- Mawarni, Kohar, F., & Refinda. (2017). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Persepsi Mahasiswa Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Jambi. *Journal of Accounting*, 0–5.
- Naimah, R. J., & Alfina, D. (2022). Pengaruh Motivasi Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Banjarmasin. 1(1), 8–14.
- Ningrum, S., Askandar, N. S., & Sudaryani, D. (2021). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jra*, 10(07), 13–24.
- Ningsih, D. I., Putri, A. A., & Marlina, E. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Economics, Accounting and Business Journal*, 2.
- Oktavia, E. C., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Postur Motivasi, Norma Subyektif, Dan Kontrol Keperilakuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 10,(1), 1–19.
- Oktavianingrum, D., Surya, R. T., & Apriawati, Y. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi OnlineE-Samsat JabarTerhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Bandung I Pajajaran)Pemerintahan/Akuntansi. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 244–252.
- Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1569–1588.
- Sabtohad, J., Mulyanto, Setiawan, A., Dewi, M. K., & Ariani, R. (2021). Pengaruh Sanksi Administrasi , Tingkat Pendapatan , Kesadaran Wajib Pajak , Sistem Samsat Drive Thru , Program E-Samsat dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pati. *Jurnal Gerbang Etam Balitbangda Kab. Kukar*, 15(2), 41–50.
- Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sihombing, N. S. R. (2022). Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Pajak Progresif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Medan Utara.
- Sudrajat, A., & Parulian Ompusunggu, A. (2015).

- Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193–202.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, N. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi. Yogyakarta: Akuntansi, FEB UII Yogyakarta*, 5(3), 35–37.
- Undang-ndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (2004).
- Wahyuningsih, I. (2019). Intensi Konsumen Terhadap Kosmetik Dan Produk Skincare Halal Di Indonesia: Pendekatan Theory of Planned Behavior. *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)*, 3(1).
- Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Suparyanto dan Rosad (2015)*, 5(3), 248–253.
- Wardani, D. K., & Rumiya, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat di Samsat Dive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15.
- Yanti, W. D. R. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi UNESA*.